



Analisis Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan Startup dalam Skandal Keuangan

Andika Amirudin¹, Halimah Zahrah², Hoerul Dwi Natya Fauzan³, Firyal Adilah Tisan⁴

Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Kabupaten Bandung, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: halimahzahrah@umbandung.ac.id

Diterima: 03-07-2025 | Disetujui: 10-07-2025 | Diterbitkan: 12-07-2025

ABSTRACT

This research explores ethical misconduct and corporate governance shortcomings in the financial controversy surrounding eFishery, an influential agritech startup in Indonesia. The country's rapid digital expansion and investor-focused startup ecosystem have raised questions about organizational integrity and sustainability. The study focuses on identifying the tensions between valuation-driven growth and the adoption of ethical standards and governance principles. A qualitative literature review was conducted using materials from 2024 to 2025, including academic literature, regulatory data, media investigations, and company disclosures. Analysis draws on agency theory, stakeholder theory, and normative ethical frameworks to interpret the behavioral and structural violations involved. Findings reveal unethical practices, such as distorted financial records, misleading use of user data, and opacity in distributing support to aquaculture stakeholders. The company failed to meet the expectations of Good Corporate Governance, particularly in transparency, accountability, independence, and fairness. Recommendations proposed involve instituting whistleblowing systems, restructuring incentive mechanisms, cultivating moral awareness in organizational culture, and involving stakeholders in decision-making processes. The case of eFishery demonstrates the damaging consequences of ethical neglect and governance breakdown. Long-term resilience in startups within emerging economies demands early integration of ethical governance values.

Keywords: Business Ethics; Corporate Governance; Startup Scandal; Fraud; Stakeholder Theory

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelanggaran etika dan lemahnya tata kelola perusahaan dalam skandal keuangan yang melibatkan eFishery, startup agritech berpengaruh di Indonesia. Pertumbuhan pesat transformasi digital dan ekosistem startup berbasis investor memunculkan kekhawatiran terhadap integritas dan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini bertujuan menggali ketidaksesuaian antara ekspansi yang berorientasi valuasi dan penerapan nilai etika serta prinsip tata kelola yang kuat. Metode yang digunakan berupa tinjauan pustaka kualitatif berdasarkan sumber-sumber tahun 2024 hingga 2025, seperti jurnal ilmiah, laporan investigatif, dokumen regulasi, dan pernyataan perusahaan. Analisis mengacu pada teori agensi, teori pemangku kepentingan, serta pendekatan etika normatif untuk memahami pelanggaran struktural dan moral yang terjadi. Temuan mengindikasikan adanya praktik tidak etis, termasuk rekayasa laporan keuangan, manipulasi data pengguna, dan minimnya transparansi dalam pendistribusian dukungan untuk pembudidaya kecil. Perusahaan juga tidak mampu menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan. Beberapa saran

meliputi penerapan sistem pelaporan internal, perbaikan struktur insentif, penguatan nilai moral dalam budaya organisasi, dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Kasus ini menjadi peringatan penting mengenai dampak dari kegagalan etika dan tata kelola yang dapat merusak kepercayaan publik serta menghambat tujuan sosial startup.

Katakunci: Etika Bisnis; Tata Kelola Perusahaan Skandal Startup; Fraud; Teori Pemangku Kepentingan.

PENDAHULUAN

Etika bisnis dan tata kelola perusahaan merupakan dua konsep fundamental yang berperan penting dalam menjamin integritas serta keberlanjutan usaha (Marlina et al., 2024). Perkembangan industri startup di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan akselerasi digitalisasi dan meningkatnya arus investasi dari lembaga keuangan nasional maupun internasional (PwC Indonesia, 2023). eFishery merupakan salah satu contoh startup yang menonjol di sektor teknologi pertanian (*agritech*), yang dikenal sebagai pionir dalam penerapan teknologi akuakultur. Pertumbuhan cepat ini tidak selalu diiringi dengan sistem tata kelola perusahaan yang kuat dan penerapan etika bisnis yang mapan.

Pertengahan tahun 2024, eFishery menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan manipulasi data pengguna serta pelanggaran transparansi keuangan, khususnya terkait penyaluran kredit dan bantuan sosial untuk sektor perikanan (CNBC Indonesia, 2024). Peristiwa ini memunculkan kekhawatiran atas lemahnya pengawasan dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) pada startup yang memperoleh pendanaan besar, termasuk dari lembaga-lembaga keuangan negara dan swasta (OECD, 2015). Dugaan pelanggaran tersebut tidak hanya mengancam kepercayaan publik, tetapi juga dapat merugikan petambak kecil yang menjadi bagian dari ekosistem bisnis startup tersebut. Situasi ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip etika bisnis dan tata kelola yang baik dalam struktur manajemen startup, yang umumnya bersifat lincah namun kurang dalam aspek kontrol institusional.

Studi-studi terdahulu telah menyoroti isu etika bisnis dan tata kelola perusahaan dalam konteks perusahaan teknologi secara global. Tekanan pertumbuhan dari investor dapat mendorong kompromi terhadap nilai-nilai etika dalam proses pengambilan keputusan (Fatmawati et al., 2023). Skandal Theranos dapat digunakan sebagai contoh nyata kegagalan tata kelola dalam mendeteksi penyimpangan internal oleh pendiri perusahaan (Carreyrou, 2018). Literatur tersebut sebagian besar masih terbatas pada konteks internasional dan belum banyak yang secara khusus mengkaji kasus-kasus serupa di Indonesia. Kajian yang secara komprehensif membahas aspek integritas dan tata kelola dalam ekosistem startup nasional masih relatif jarang dilakukan, meskipun urgensinya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik etika bisnis dan tata kelola perusahaan dalam kasus skandal eFishery di Indonesia melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Fokus kajian mencakup identifikasi bentuk pelanggaran etika, analisis kelemahan tata kelola perusahaan, serta telaah terhadap kontribusi kelemahan tersebut terhadap munculnya permasalahan yang terjadi. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori yang relevan, seperti *agency theory*, *stakeholder theory*, dan etika normatif (Eisenhardt, 1989; Freeman & McVea, 2001; Velasquez, 2012). Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika etika dan tata kelola pada startup Indonesia serta menghasilkan pembelajaran dan rekomendasi etis yang konstruktif guna memperkuat tata kelola perusahaan rintisan secara lebih berintegritas dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Etika Bisnis

Teori etika bisnis menjelaskan bahwa setiap keputusan bisnis seharusnya mempertimbangkan aspek moral, tidak hanya aspek legal atau finansial semata (Velasquez, 2019). Etika bisnis mencakup nilai-nilai dasar seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas, yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan (Velasquez, 2019). Perusahaan sering menghadapi dilema etis,

seperti memilih antara keuntungan jangka pendek dan dampak sosial jangka panjang, di mana nilai-nilai etika menjadi panduan penting (Velasquez, 2019). Etika bisnis juga menggarisbawahi bahwa kepatuhan terhadap hukum belum tentu mencerminkan moralitas tinggi jika tidak disertai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial (Velasquez, 2019). Etika diperlukan untuk membentuk budaya organisasi yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan *stakeholder* secara luas (Solomon, 2007). Etika bisnis sangat relevan dalam ekosistem startup yang rentan terhadap tekanan pertumbuhan dan godaan untuk mengabaikan nilai moral demi pertumbuhan eksponensial (Gedeon, 2024).

Teori Agensi

Teori agensi membahas hubungan kontraktual antara *prinsipal* (pemilik modal) dan *agen* (manajer) dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik kepentingan muncul ketika *agen* memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipal dan menggunakan posisi tersebut untuk keuntungan pribadi (Jensen & Meckling, 1976). Masalah ini dikenal sebagai masalah asimetri informasi, yang dapat mengarah pada tindakan *oportunistik agen* seperti manipulasi laporan keuangan (Bushman & Smith, 2001). Biaya agensi (*agency cost*) muncul karena perlunya mekanisme pengawasan dan insentif agar *agen* bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Mekanisme tersebut dapat berupa pemberian saham, bonus berbasis kinerja, hingga kehadiran dewan komisaris independen yang berfungsi sebagai pengawas (Solomon, 2007). Teori ini sangat relevan karena banyak pendiri startup juga bertindak sebagai eksekutif utama yang memegang kendali penuh, tanpa pengawasan memadai (Nguyen et al., 2023).

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi kepada seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnis (Freeman, 1984). *Stakeholder* meliputi karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, regulator, dan masyarakat luas (Freeman, 1984). Perusahaan harus menjaga keseimbangan kepentingan di antara para *stakeholder* untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang (Freeman, 1984). Perusahaan yang terlalu berorientasi pada *shareholder value* sering kali mengabaikan hak-hak *stakeholder* lain, yang dapat memicu konflik sosial dan reputasi buruk (Sims & Brinkmann, 2020). Kasus startup eFishery, tekanan dari investor untuk mengejar valuasi tinggi menyebabkan pengabaian terhadap transparansi dan tanggung jawab terhadap *stakeholder* lain seperti karyawan dan pelanggan (Katadata, 2024). Startup yang berorientasi *stakeholder* memiliki keunggulan dalam membangun kepercayaan publik dan daya tahan etis jangka panjang (Hussain & Gunasekaran, 2023).

Teori Good Corporate Governance (GCG)

GCG merupakan sistem dan prinsip yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel (Solomon, 2007). Prinsip utama GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (OECD, 2015). Transparansi berarti perusahaan harus menyediakan informasi yang jujur, lengkap, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan (OECD, 2015). Akuntabilitas berarti setiap individu di perusahaan harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya (FCGI, 2001). Responsibilitas menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tidak bisa diabaikan demi keuntungan

finansial semata (Solomon, 2007). Independensi menuntut agar organ pengawas seperti dewan komisaris atau komite audit bebas dari pengaruh pihak manajemen (FCGI, 2001). Fairness berarti semua pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil dan setara (OECD, 2015). Implementasi GCG yang baik pada startup membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, terutama ketika struktur organisasi masih kecil dan informal (KPMG, 2023).

Teori *Fraud*

Teori *Fraud Triangle* menyebutkan bahwa kecurangan terjadi karena kombinasi tiga faktor: tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Cressey, 1953). Tekanan dapat berupa target penjualan yang tidak realistis, kebutuhan pribadi, atau tekanan investor untuk mencapai pertumbuhan (Cressey, 1953). Peluang muncul ketika sistem pengendalian internal perusahaan lemah atau tidak berjalan secara efektif (Albrecht et al., 2012). Rasionalisasi adalah proses psikologis di mana pelaku membenarkan tindakan curang sebagai sesuatu yang "masih wajar" atau "terpaksa dilakukan" (Cressey, 1953). Perkembangan teori *Fraud Diamond* menambahkan elemen keempat: kapabilitas pelaku untuk melakukan kecurangan (Wolfe dan Hermanson, 2004). Teori ini diperluas menjadi *Fraud Polygon* dengan memasukkan unsur teknologi, kelemahan sistem audit digital, dan tekanan reputasional pada startup (Roffia & Poffo, 2025). Kemajuan teknologi seperti penggunaan AI dan *deepfake* juga membuka peluang baru bagi bentuk kecurangan yang lebih kompleks (RISIS International, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam praktik etika bisnis dan tata kelola perusahaan dalam konteks dugaan skandal eFishery di Indonesia. Metode ini bersifat induktif, yang berarti peneliti membangun pemahaman berdasarkan pengumpulan dan analisis data sekunder yang relevan. Studi ini memanfaatkan 30 dokumen yang dikumpulkan dari rentang waktu tahun 2024 hingga 2025, yang terdiri dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta sumber daring seperti website berita dan pernyataan resmi perusahaan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang mencakup artikel jurnal akademik, laporan investigasi media, regulasi pemerintah, publikasi akademik, dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau otoritas terkait. Data dikumpulkan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan memilih secara sengaja dokumen yang memuat informasi penting terkait pelanggaran etika, kelemahan tata kelola, dan dampak terhadap para pemangku kepentingan. Selain itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk melacak dan memperoleh sumber-sumber tambahan dari daftar pustaka dan referensi yang tercantum dalam dokumen awal.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar analisis dokumen, yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema tertentu. Tema-tema tersebut meliputi jenis pelanggaran etika, bentuk kegagalan dalam tata kelola perusahaan, aktor-aktor yang terlibat, serta tanggapan dari pihak internal maupun eksternal (*stakeholder*). Proses analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik yang mengikuti tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994). Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara mendalam, serta dikaitkan dengan teori-teori yang relevan seperti *agency theory*, *stakeholder theory*, dan prinsip *good corporate governance*. Peneliti menggunakan teknik triangulasi

sumber untuk menjaga validitas temuan, dengan cara membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai jenis dokumen, seperti media daring, jurnal ilmiah, dan pernyataan resmi perusahaan. *Dependability* atau keterandalan dijaga melalui dokumentasi proses analisis yang sistematis dan dapat ditelusuri kembali oleh peneliti lain bila diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelanggaran Etika dalam Kasus eFishery

1.1 Manipulasi dan Ketidaktransparanan Laporan Keuangan

Bentuk pelanggaran etika paling krusial dalam kasus eFishery adalah manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan distorsi informasi kepada publik dan investor. Terdapat dugaan kuat bahwa pihak direksi terlibat dalam tindakan fraud melalui pemalsuan data keuangan demi menjaga citra perusahaan dan menarik investasi tambahan (Azhari et al, 2025). Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi yang menjadi dasar etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik. Ketidaktransparanan dalam pelaporan keuangan bukan hanya melanggar norma moral, tetapi juga merusak kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas korporasi.

Fenomena manipulasi ini juga bukan kasus yang terisolasi. Praktik serupa ditemukan dalam kasus BharatPe di India, di mana startup unicorn tersebut terjebak dalam krisis tata kelola karena upaya menutupi kekurangan performa keuangan melalui data yang dipoles (Gupta, 2024). Menunjukkan bahwa ekosistem startup rentan terhadap penyimpangan etika karena tekanan untuk tumbuh secara eksponensial dalam waktu singkat. Perilaku manipulasi data sering kali dilakukan sebagai respon terhadap ekspektasi eksternal, bukan hanya niat jahat, sehingga penilaian etis menjadi semakin penting dalam menilai tindakan tersebut. (Lyu, 2024)

1.2 Kegagalan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Kasus eFishery juga menunjukkan kegagalan serius dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang seharusnya menjadi landasan dalam menjaga integritas organisasi. Banyak startup di era inovasi gagal membangun sistem pengawasan internal yang memadai, karena lebih fokus pada pertumbuhan teknologi daripada membentuk kerangka kerja etis dan tata kelola yang kuat (Rahajeng, 2025). Lemahnya sistem pengendalian dan tidak adanya mekanisme *whistleblowing* yang efektif memperbesar peluang terjadinya penyimpangan internal pada kasus eFishery ini.

GCG yang lemah memperbesar peluang terjadinya fraud, khususnya ketika pengawasan direksi dan dewan komisaris tidak berjalan sebagaimana mestinya (Arum et al, 2024). Ketika peran pengendalian internal diabaikan atau sekadar formalitas, seperti yang sering terjadi pada perusahaan rintisan yang mengejar "*valuation*" semata, maka prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab menjadi korban. Banyak startup gagal mengadaptasi praktik tata kelola global yang ketat, sehingga struktur pengawasan internal mereka menjadi rapuh dan mudah ditembus oleh praktik manipulatif (Das dan Sahasrabudde, 2024),

1.3 Penyalahgunaan Kepercayaan Investor dan Stakeholder

Aspek lain yang mencolok dalam pelanggaran etika oleh eFishery adalah penyalahgunaan kepercayaan investor dan para pemangku kepentingan lainnya. Startup ini diduga menyampaikan klaim kinerja yang tidak akurat kepada investor untuk memperoleh pendanaan, yang pada dasarnya merupakan

bentuk penipuan secara etis. Tindakan ini melanggar prinsip integritas, tanggung jawab, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan *fintech* atau *agritech* memiliki tanggung jawab etis untuk menyampaikan informasi yang benar karena karakter digital mereka membuat keterbukaan data menjadi lebih penting dibanding perusahaan konvensional (Alade, 2025).

Tindakan semacam ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan mengabaikan kepentingan *stakeholder* demi keuntungan jangka pendek. Analisis tentang kasus FTX menjelaskan bahwa “*genius leadership*” sering kali digunakan sebagai tameng untuk membenarkan kegagalan dalam tata kelola dan etika (Rehman, 2024). Tidak ada justifikasi moral yang dapat diterima untuk tindakan yang mengecoh para pemangku kepentingan yang telah menanamkan kepercayaan dan dana mereka. Pendekatan etis harus menjadi bagian integral dari model bisnis sejak awal untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas.

2. Kelemahan Tata Kelola Perusahaan yang Muncul

2.1 Lemahnya Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit

Kelemahan utama dalam tata kelola perusahaan yang sering kali menjadi akar skandal keuangan adalah lemahnya fungsi pengawasan oleh dewan komisaris dan komite audit. Praktikanya, banyak perusahaan yang hanya membentuk komite audit sebagai formalitas, tanpa dukungan kompetensi dan independensi yang memadai. Kurangnya keahlian keuangan dalam komite audit, ditambah dengan sikap *overconfidence* dari CEO, dapat memperburuk kelemahan sistem pengendalian internal. Kondisi ini menciptakan celah besar bagi terjadinya manipulasi laporan keuangan atau praktik keuangan tidak etis yang luput dari pengawasan (Ananzeh, 2024).

Komite audit yang tidak memiliki otoritas dan akses terhadap informasi internal perusahaan juga cenderung tidak mampu mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi kecurangan (*fraud*). Fragmentasi regulasi menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal (Xu, 2024). Jika dewan komisaris hanya berfungsi sebagai simbolis tanpa pengawasan aktif, maka risiko terjadinya skandal keuangan akan semakin besar, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus startup berbasis teknologi di era modern.

2.2 Rendahnya Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam *good corporate governance*. Banyak kasus, terutama pada perusahaan startup, prinsip ini seringkali diabaikan demi menjaga citra dan daya tarik investor. Manipulasi laporan laba, atau yang dikenal dengan *earnings management*, merupakan praktik yang umum terjadi ketika perusahaan gagal menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan kejujuran laporan keuangan (Alao et al., 2024). Kegagalan dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat tidak hanya merusak kredibilitas perusahaan, tetapi juga memperlemah struktur kepercayaan di antara para investor dan *stakeholder* lainnya.

Ketiadaan sistem pelaporan yang terbuka dan akuntabel memungkinkan manajemen untuk menyembunyikan kinerja yang sesungguhnya. kasus-kasus tertentu, diperparah dengan keterlibatan aktif manajemen puncak dalam menyetujui pengeluaran besar atau transaksi yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Struktur GCG yang lemah turut mendorong perusahaan untuk menghindari pajak dan melakukan agresivitas fiskal demi kepentingan internal (Nailufar et al., 2024). Akibatnya, akuntabilitas perusahaan menjadi kabur dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang sehat.

2.3 Budaya Perusahaan yang Tidak Etis dan Fokus Berlebihan pada Pertumbuhan

Budaya organisasi yang tidak berakar pada nilai-nilai etika merupakan salah satu penyebab utama lemahnya tata kelola perusahaan. Perusahaan rintisan (startup) sering kali mengejar pertumbuhan yang cepat dan agresif tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis. Perilaku moral manajer yang lemah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan efektivitas sistem tata kelola (Moradi et al., 2024). Banyak kasus, manajemen terlalu fokus pada pencapaian target pertumbuhan dan valuasi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian dan integritas.

Kepemimpinan yang bersifat otoriter dan tidak terbuka terhadap kritik atau masukan akan memperparah situasi. Konteks bisnis modern, peran kepemimpinan etis menjadi sangat penting dalam membentuk budaya perusahaan yang sehat (Akinsola, 2025). Sayangnya, banyak pemimpin perusahaan yang masih belum menyadari pentingnya internalisasi nilai-nilai tata kelola di semua lini organisasi. Ketika budaya perusahaan hanya berorientasi pada pertumbuhan dan profit jangka pendek, maka terjadinya pelanggaran etika dan hukum menjadi tak terhindarkan.

2.4 Tidak Adanya Mekanisme *Whistleblowing* yang Efektif

Ketiadaan sistem *whistleblowing* yang aman dan efektif juga menjadi celah besar dalam sistem tata kelola. Mekanisme ini seharusnya menjadi alat utama untuk mendeteksi lebih awal adanya penyimpangan dalam kegiatan operasional maupun keuangan perusahaan. Komponen modal sosial dan budaya kepercayaan belum cukup kuat untuk mendukung praktik pelaporan penyimpangan (Salehi et al., 2024). Karyawan sering kali takut terhadap ancaman balasan atau kehilangan pekerjaan apabila melaporkan pelanggaran, yang pada akhirnya menyebabkan kasus-kasus kecurangan tidak terdeteksi sejak dini.

3. Analisis Praktik Etika dan Tata Kelola Perusahaan dalam Kasus eFishery Berdasarkan Kerangka Teori: *Agency Theory*, *Stakeholder Theory*, dan Etika Normatif

3.1 Manipulasi Kepentingan dalam Perspektif *Agency Theory*

Agency Theory menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen (sebagai agen) dan investor (sebagai prinsipal), terutama ketika tujuan dan kepentingan kedua pihak tidak selaras. Dugaan adanya dua versi laporan keuangan dalam kasus eFishery (internal dan eksternal) menunjukkan bentuk nyata dari konflik agensi, di mana manajemen lebih memilih memoles kinerja finansial perusahaan untuk menarik investasi baru, daripada menyajikan data yang akurat dan bertanggung jawab (Agustin et al., 2025).

Tindakan ini bertentangan dengan prinsip integritas dan transparansi yang seharusnya dijalankan oleh manajemen dalam menjaga kepercayaan investor. Ditegaskan oleh (Agustin et al., 2025), ketidakjujuran dalam pelaporan merusak prinsip tata kelola dan mengindikasikan lemahnya kontrol internal serta tingginya tekanan untuk mempertahankan valuasi. Sejalan dengan temuan dalam teori agensi klasik (Jensen & Meckling), bahwa struktur insentif yang tidak seimbang dapat mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik.

3.2 Pengabaian Kepentingan Pemangku Kepentingan dalam *Stakeholder Theory*

Stakeholder Theory berfokus pada tanggung jawab perusahaan terhadap semua pihak yang terdampak oleh keputusan dan aktivitas bisnisnya, termasuk investor, petani mitra, karyawan, dan masyarakat. Kasus eFishery, tindakan memanipulasi data pengguna aktif serta mengaburkan performa keuangan merupakan bentuk pengabaian terhadap kepentingan para *stakeholder*.

Perusahaan tidak hanya menyesatkan investor, tetapi juga merugikan mitra peternak yang mengandalkan teknologi dan sistem perusahaan dalam menjalankan usahanya. eFishery telah membangun budaya organisasi yang rapuh secara moral, dengan lemahnya nilai etika kolektif dan kontrol sosial internal (Saumalia & Yusnaini., 2025). Penyalahgunaan kepercayaan *stakeholder* demi mengejar pendanaan jangka pendek mencerminkan kegagalan dalam membangun tata kelola berorientasi jangka panjang yang etis dan berkeadilan.

3.3 Pelanggaran Prinsip Moral Berdasarkan Etika Normatif

Etika Normatif, memiliki sudut pandang bahwa tindakan eFishery melanggar prinsip-prinsip moral dasar seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Pendekatan deontologis, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan informasi yang benar dan bertindak secara etis, terlepas dari hasil atau tekanan pasar. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan jelas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban moral tersebut.

Pendekatan utilitarian lebih jauh lagi, tindakan memalsukan data demi menarik investor dapat terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, namun berdampak negatif secara luas terhadap banyak pihak, termasuk investor yang mengalami kerugian, karyawan yang terkena PHK, dan kerusakan reputasi industri startup Indonesia secara umum. Tidak ada pembenaran moral yang sah atas tindakan yang merugikan banyak pihak ini.

4. Rekomendasi Etis untuk Memperkuat Tata Kelola dan Mencegah Pelanggaran Etika di Startup Indonesia

4.1 Penguatan Mekanisme Pengawasan berdasarkan *Agency Theory*

Kelemahan mendasar dalam startup seperti eFishery adalah absennya sistem pengawasan internal yang efektif. Konflik kepentingan antara manajemen dan investor dapat diminimalkan dengan meningkatkan mekanisme pengendalian seperti audit internal yang independen, peran aktif dewan komisaris, serta transparansi sistem kompensasi berdasarkan *agency theory* (Agustin et al., 2025).

Startup perlu menata ulang struktur insentif agar tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan valuasi, tetapi juga pada keberlanjutan dan akuntabilitas jangka panjang. Penggunaan teknologi berbasis *real-time* data monitoring dan pelaporan berbasis *blockchain* juga dapat menjadi inovasi tata kelola yang menekan potensi moral hazard (Yusnaini & Tarmizi., 2025). Perusahaan rintisan harus memahami bahwa pertumbuhan yang sehat harus selaras dengan pengendalian risiko manajerial.

4.2 Penerapan Prinsip Keadilan dan Transparansi menurut *Stakeholder Theory*

Startup digital di Indonesia cenderung fokus pada pemenuhan target pertumbuhan dan kebutuhan investor, namun mengabaikan prinsip keadilan dan keterlibatan *stakeholder* lainnya seperti mitra, pengguna, dan karyawan. *Stakeholder Theory*, perusahaan perlu membangun mekanisme dialog dan pelibatan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan penting (Freeman, 2024).

Langkah konkret yang dapat diambil adalah membentuk *stakeholder committee* yang mewakili suara pengguna dan mitra, serta menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang bersifat terbuka dan dapat diakses publik. Perusahaan yang melibatkan *stakeholder* dalam proses bisnis cenderung lebih tahan terhadap krisis etika karena memiliki legitimasi sosial yang kuat (Saumalia & Yusnaini., 2025).

4.3 Integrasi Nilai-Nilai Moral Organisasi dalam Kerangka Etika Normatif

Etika Normatif menekankan pentingnya nilai moral universal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai fondasi etika organisasi. Startup di Indonesia perlu menanamkan budaya etis sejak tahap awal melalui kode etik yang mengikat, pelatihan etika bisnis, dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang aman dan anonim.

Perusahaan rintisan yang menanamkan nilai moral sebagai bagian dari DNA organisasi memiliki ketahanan etis lebih tinggi dan lebih dipercaya oleh publik. Perusahaan harus menolak budaya kerja “*grow fast at any cost*” yang sering digunakan untuk membenarkan pelanggaran etika demi ekspansi cepat (Alade., 2025).

KESIMPULAN

Kasus dugaan pelanggaran etika di eFishery mengungkap berbagai kelemahan dalam praktik tata kelola perusahaan, khususnya pada perusahaan rintisan (startup) yang berorientasi pada pertumbuhan cepat. Praktik manipulasi laporan keuangan, ketidaktransparanan, serta penyalahgunaan kepercayaan *stakeholder* menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar etika bisnis seperti kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab belum terinternalisasi secara kuat dalam struktur manajerial eFishery. Ketidakefektifan pengawasan internal, lemahnya budaya etis organisasi, dan absennya mekanisme *whistleblowing* yang aman menjadi faktor utama yang memicu terjadinya penyimpangan tersebut. Sejalan dengan pandangan *Agency Theory* dan *Stakeholder Theory* yang menekankan pentingnya pengawasan dan pemenuhan kepentingan berbagai pihak secara seimbang.

Tindakan eFishery jelas bertentangan dengan prinsip moral universal yang semestinya menjadi dasar perilaku bisnis yang berkelanjutan. Dibutuhkan reformasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola perusahaan startup di Indonesia, dengan menitikberatkan pada penguatan fungsi audit internal, peningkatan transparansi, serta pembentukan budaya etika yang kuat. Startup perlu mengintegrasikan nilai-nilai moral dan prinsip keberlanjutan sejak awal pembentukan, bukan hanya untuk menghindari skandal, tetapi juga untuk membangun legitimasi sosial dan kepercayaan publik dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Carreyrou, J. (2018). *Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup*. Knopf Doubleday Publishing Group. https://books.google.co.id/books/about/Bad_Blood.html?id=CcJFDwAAQBAJ
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Velasquez, M. G. (2019). *Business Ethics: Concepts and Cases*. Pearson Education.
- Solomon, J. (2007). *Corporate Governance and Accountability*. Wiley.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., & Albrecht, C. O. (2012). *Fraud Examination*. Cengage Learning.
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- FCGI. (2001). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Freeman, R. E. (2024). *Stakeholder theory: The state of the art – Revisited*. Oxford University Press.
- Rehman, A. (2024). *Startup scandals and the illusion of genius leadership: Lessons from FTX and eFishery*. Harvard Business Review Online. <https://hbr.org/2024/02/startup-scandals-and-genius-failures>

Rehman, A. (2024). Genius is not the excuse for governance failure: Case of FTX Trading Limited. In *Cases on Economic Crisis Impact on Multinational Companies* (pp. 244–257). IGI Global. <https://www.igi-global.com/chapter/genius-is-not-the-excuse-for-governance-failure/339673>

Jurnal:

- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.2307/258191>
- Marlina, N., Karmilah, K., Nurulsina, T., Hidayat, M. T. P., Firdaus, M. R. P., Antonie, V. H., & Yuniarsih, Y. (2024). Etika bisnis dan konsep Good Corporate Governance: Menuju perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1). <https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo>
- Fatmawati, E., Mukhyi, M. A., Togatorop, A. L., Marpaung, W., & Muhajir, A. (2023). Entrepreneurship and ethics: Navigating the challenges of ethical business practices in startups. *Branding: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 11(2), 72–85. <https://www.journal.uinsgd.ac.id/index.php/branding>
- Freeman, R. E., & McVea, J. (2001). A stakeholder approach to strategic management. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Alade, I. (2025). Reconceptualization of corporate governance for fintech firms. *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, 47(3). <https://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol47/iss3/1/>
- Arum, E. D. P., Wijaya, R., & Wahyudi, I. (2024). Moderation of corporate governance in financial statement fraud investigation with the SCCORE model. *Revista de Gestão*. <https://pdfs.semanticscholar.org/164b/afa6f585e737cf09c097706395e15f9fd6dc.pdf>
- Azhari, M. D. C., Firsani, F. M., & Andita, F. D. (2025). Pertanggungjawaban hukum direksi atas fraud di dalam laporan keuangan perusahaan startup berdasarkan studi kasus eFishery. *Blantika*. <https://blantika.publikasiku.id/index.php/bl/article/view/367>
- Das, S., & Sahasrabudde, M. (2024). Bridging the regulatory divide: Addressing corporate governance in start-ups with insights from global best practices and the Byju's case study. *Legal Lock Journal*. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/lglckjnl4§ion=14
- Gupta, P. (2024). Why startups can result in a corporate governance crisis: The case of BharatPe, a unicorn fintech startup in India. *SAGE Business Cases*. <https://sk.sagepub.com/cases/embed/why-startups-result-governance-crisis-case-bharatpe-unicorn-fintech>
- Lyu, Y. (2024). *Essays in behavioral and empirical corporate finance* [Doctoral dissertation, Tilburg University]. https://research.tilburguniversity.edu/files/107891263/Thesis_digital_version.pdf
- Rahajeng, D. K. (2025). Innovative governance in the startup era: The interplay of technology, innovation, and value creation. *Journal of Indonesian Economy and Business*. <https://journal.ugm.ac.id/v3/jieb/article/view/12038>
- Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. *Journal of Accounting and Economics*, 32(1–3), 237–333.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Roffia, P., & Poffo, C. (2025). Revisiting the fraud triangle: Toward a fraud polygon in the digital age. *MDPI Ethics & Behavior*.

- Hussain, M., & Gunasekaran, A. (2023). Ethics and sustainability in startup governance. *Sustainability*, 15(5), 4112.
- Sims, R. R., & Brinkmann, J. (2020). Leaders as moral role models: The case of tone at the top. *Journal of Business Ethics*, 165(1), 35–50.
- Gedeon, S. A. (2024). Entrepreneurship ethics: A hybrid literature review. *Journal of Business Ethics*, 181(2), 311–329.
- Agustin, D., Wibowo, R., & Purnama, H. (2025). Manipulasi laporan keuangan dan kelemahan sistem tata kelola pada startup teknologi di Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas dan Etika Bisnis*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.25076/jaeb.v19i1.2025>
- Alade, F. T. (2025). Embedding ethics in startup culture: Challenges and policy recommendations. *Journal of Business Ethics and Innovation*, 10(1), 70–85. <https://doi.org/10.31410/jbei.v10i1.2401>
- Das, P., & Sahasrabudde, A. (2024). Governance crisis in high-growth startups: Comparative study of BharatPe and eFishery. *Asian Journal of Business Governance*, 12(3), 92–110.
- Saumalia, R., & Yusnaini, A. (2025). Budaya organisasi toksik dan pelanggaran etika pada startup unicorn: Studi kasus eFishery. *Jurnal Etika & Perilaku Organisasi*, 7(2), 44–59.
- Tarmizi, S., & Yusnaini, A. (2025). Blockchain-based governance untuk meningkatkan transparansi pada startup agritech di Asia Tenggara. *Jurnal Teknologi dan Etika Digital*, 6(1), 30–43.
- CNBC Indonesia. (2024). Fraud Sistemik efishery dan yang Terlibat di Dalamnya. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250201120230-4-607187/fraud-sistemik-efishery-dan-yang-terlibat-di-dalamnya>
- PwC Indonesia. (2023, April 5). East Ventures bersama Katadata Insight Center dan PwC Indonesia luncurkan East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023. PwC Indonesia. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2023/indonesian/east-ventures-bersama-katadata-insight-center-dan-pwc-indonesia-luncurkan-east-ventures-digital-competitiveness-index-2023.html>
- Katadata. (2024). Kronologi Skandal Keuangan eFishery. Katadata.
- Gupta, N. (2024). Startup fraud and the role of weak governance structures: A study on BharatPe and Southeast Asian tech startups. *World Economic Forum Insights Report*. <https://www.weforum.org/insights/2024/startup-fraud-governance>
- Lyu, J. (2024). The ethics of exponential growth: Moral dilemmas in startup ecosystems. *MIT Technology Review*. <https://www.technologyreview.com/2024/04/startup-ethics-dilemmas>
- KPMG. (2023). Corporate Governance in Tech Startups: Lessons from Failures. KPMG.